



## Realisasi Target PAD Perlu Terobosan Cerdas

**Borneo Tribune, Nanga Pinoh**

ENAM Fraksi DPRD Kabupaten Melawi, Rabu lalu menyampaikan pandangan umum terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. Persoalan tak tercapainya target PAD Melawi serta perlunya terobosan baru untuk meningkatkan PAD menjadi salah satu hal yang banyak disampaikan oleh fraksi.

Fraksi PAN melalui juru bicara fraksi, Yusnaidi mengatakan sebagaimana laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2012 yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, yang mana laporan tersebut telah dibahas dan dikaji oleh DPRD melalui Pansus LKPj. Sehingga dari laporan hasil pansus tersebut, Fraksi PAN secara objektif memberikan pandangan bahwa dalam periode 2012, pembangunan Kabupaten Melawi mengalami peningkatan yang signifikan, terutama keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Melawi.

Selain itu, dengan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi sebagaimana laporan pemeriksaan dari BPK RI bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi mengalami perkembangan yang cukup baik. Ya itu dari periode sebelumnya dinilai tidak wajar sehingga pada periode 2012 dinilai wajar dengan persyaratan.

"Untuk itu, kami dari fraksi PAN memberikan apresiasi dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada Pemkab Melawi. Semoga kondisi penyajian laporan keuangan ini dapat kita pertahankan dan ditingkatkan pada periode yang akan datang," ungkapnya.

Kemudian mengenai laporan realisasi anggaran bahwa pendapatan daerah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2012 sebesar Rp 568,3 miliar. Dengan realisasi sebesar Rp 541,4 miliar atau 95,25 persen dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan.

"Secara umum dapat dikatakan bahwa Pemkab Melawi telah mampu merealisasikan pendapatan daerah sebagaimana yang telah direncanakan," jelasnya.

Dari beberapa komponen pendapatan daerah yang masih belum mampu memberikan kontribusi memadai terhadap aspek pendapatan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Rencana PAD yang ditetapkan sebesar Rp 23,8 miliar dan hanya mampu terealisasi sebesar Rp 12,2 miliar. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya daya serap pendapatan berupa pendapatan pajak daerah yang hanya terserap sebesar 68 persen, pendapatan retribusi daerah terserap sebesar 71 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terserap sebesar 24 persen.

"Hal ini merupakan tantangan serta adanya upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras kita bersama untuk meningkatkan realisasi PAD, terutama disarankan kepada instansi pemerintah terkait agar dengan konsisten menerapkan dan menjalankan perangkat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan

PAD," lugasnya.

Fraksi PAN merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Melawi tentang perlu adanya standar analisis biaya (SAB) sebagai keperluan SKPD dalam menyusun standar kebutuhan anggaran dalam bentuk RKA-SKPD yang kemudian diregresikan berupa volume/kuantitas kegiatan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.

Sistem ini untuk menghindari terjadinya pembengkakan anggaran pembiayaan rutin dari SKPD. Pembengkakan tersebut bukan karena banyaknya kuantitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan, namun dikarenakan belum jelasnya standar kebutuhan yang sesungguhnya terhadap kebutuhan riil anggaran rutin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Hal ini berdampak pada pembuatan program belanja pembangunan dan belanja rutin yang inefisiensi di dalam penyerapan anggaran.

Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Melawi melalui juru bicaranya, M. Ridwan Saidi mengatakan, terkait dengan masih rendahnya PAD yang ada maka fraksinya mengharapakan ada terobosan Pemda Melawi.

"Kemudian dalam hal perbaikan kinerja dan kemampuan penyerapan anggaran ke depan agar dapat mencapai target dan sasaran secara optimal sehingga kami berharap ada semacam evaluasi dan perbaikan," paparnya. (eko) □